



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)**

**DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perubahan Renja DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Perubahan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi

Bukittinggi, 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI

ISRA YONZA, SH, MH
NIP. 19710719 200212 1 003

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
DAFTAR TABEL		3
BAB I	PENDAHULUAN	4
	1.1. Latar Belakang	4
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	8
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB IV	PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V	PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020	7
Tabel 2.2	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Triwulan II Tahun 2021	17
Tabel 4.1	Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSPPTK Tahun 2021	46
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) dan rencana kerja lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Renstra dalam pelaksanaannya diterjemahkan dan diimplementasikan ke dalam Renja setiap tahun yang lebih bersifat operasional, yang memuat program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Selanjutnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 360 sampai dengan 368 mengatur tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja yang dilakukan dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rancangan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Perubahan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2021 dilakukan dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan dan optimisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bukittinggi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12);

9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021;
11. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Nomor: 188.45-68/DPMPTSPPTK-BKT/2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Nomor: 188.45-57/DPMPTSPPTK-BKT/2017 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021 adalah untuk memaksimalkan dalam pelaksanaan dokumen perencanaan suatu kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai 31 Desember 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Perubahan Renja SKPD dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran SKPD.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja serta mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan serta program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi sebagai berikut :

- Bab I **Pendahuluan;** memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertaidengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
- Bab II **Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan,** memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 sampai dengan Triwulan II tahun 2020.
- Bab III **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah,** Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerha Renstra Perangkat Daerah
- Bab IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**
- Bab V **Penutup;** memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB II
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 berdasarkan realisasi, target, kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Berikut disajikan Tabel Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja tahun 2020 disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi Tahun 2020

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Keuangan		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN	805,408,600	800,741,002.00	99.42%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80,408,600	106,741,628.00	132.75%
	Sewa Pemakaian Alat Berat/Mesin	80,408,600	106,741,628.00	132.75%
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	725,000,000	693,999,374.00	95.72%
	-Retribusi IMB	725,000,000	693,999,374.00	95.72%
	BELANJA	20,127,594,854	19,285,543,613.56	95.82%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,474,063,488	6,195,137,251.57	82.89%
	Belanja Pegawai	7,474,063,488	6,195,137,251.57	82.89%
	- Belanja Gaji dan Tunjangan	5,121,150,058	3,986,796,793.00	77.85%
	- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2,312,643,000	2,182,961,374.00	94.39%
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40,270,430	25,379,084.57	63.02%
	BELANJA LANGSUNG	13,678,836,617	13,090,406,361.99	95.70%
	Non Urusan			
	Penunjang Urusan Pemerintah			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	900,304,000	678,364,471	75.35%
1	Penyediaan jasa surat menyurat.	2,500,000	2,140,000.00	85.60%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248,000,000	107,845,372.00	43.49%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	206,750,000	159,551,549.00	77.17%

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Keuangan		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	119,910,000	118,151,000.00	98.53%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000	9,733,500.00	97.34%
6	Penyediaan alat tulis kantor	21,744,000	19,456,500.00	89.48%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35,400,000	24,634,800.00	69.59%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	3,238,000.00	64.76%
9	Penyediaan makanan dan minuman	20,000,000	14,360,500.00	71.80%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	156,000,000	149,607,250.00	95.90%
11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	35,000,000	29,837,000.00	85.25%
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	40,000,000	39,809,000.00	99.52%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,622,385,314	11,381,412,353	97.93%
1	Pengadaan mebeleur	491,920,000	390,661,000.00	79.42%
2	Pengadaan peralatan kantor	825,470,000	820,628,050.00	99.41%
3	Pembangunan Kantor DPMPPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik) Lanjutan	10,294,782,656	10,169,813,469.99	98.79%
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	10,212,658	309,833.00	3.03%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20,400,000	19,200,000.00	94.12%
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	20,400,000	19,200,000.00	94.12%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,825,000	3,825,000.00	100.00%
1	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan DPMPPTSPPTK	3,825,000	3,825,000.00	100.00%
	Urusan Wajib			
	Penanaman Modal			
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	5,774,000	5,484,150.00	94.98%
1	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	5,774,000	5,484,150.00	94.98%
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1,321,250	1,321,250.00	100.00%
1	Promosi dan Gelar Potensi Investasi	1,321,250	1,321,250.00	100.00%
	Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	7,851,290	7,851,290.00	100.00%
1	Kajian Penanaman Modal	7,851,290	7,851,290.00	100.00%
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	532,578,715	491,850,103.00	92.35%
1	Pelayanan Perizinan Sektor A	152,159,135	149,168,398.00	98.03%
2	Pelayanan Perizinan Sektor B	262,425,640	241,969,730.00	92.21%
3	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	25,914,740	24,741,875.00	95.47%
4	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	15,254,000	12,375,800.00	81.13%
5	Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	21,349,200	18,958,050.00	88.80%
7	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	43,307,000	38,712,800.00	89.39%

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Keuangan		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5
8	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	6,015,000	5,103,450.00	85%
9	Pengawasan Tempat Usaha	6,154,000	820,000.00	13%
	Tenaga Kerja			
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	112,163,750	87,273,350.00	77.81%
1	Pelatihan Kewirausahaan	58,197,100	35,767,550.00	61%
2	Pelatihan Tata Boga	53,481,100	51,074,400.00	95.50%
3	Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta	485,550	431,400.00	88.85%
4	Monev Eks Siswa Pelatihan	0	-	0%
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	21,957,312.50	20,131,135.00	91.68%
1	Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	13,658,000	12,949,035.00	94.81%
2	Asistensi dan Pembinaan Peratuan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	8,299,312.50	7,182,100.00	87%
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	20,868,500	19,850,150.00	95.12%
1	Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	20,868,500	19,850,150.00	95.12%
	Urusan Pilihan			
	Industri			
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	404,277,485.50	348,987,664.00	86.32%
1	Pengembangan & pelayanan teknologi industri	22,243,000.50	22,243,000.00	100%
2	Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	257,148,585	244,808,164.00	95.2%
3	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan	124,885,900	81,936,500.00	66%
4	Perkuatan Asosiasi Makanan	0	-	0%
5	Bimbingan Teknis Standarisasi Produk	0	-	0.00%
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	25,130,000	24,855,446.00	98.91%
1	Pelatihan Teknis Industri Kecil Menengah	0	-	0.00%
2	Promosi Industri Kecil Menengah	0	-	0.00%
3	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi	25,130,000	24,855,446.00	98.91%
4	Pendampingan Gugus Kendali Mutu	0	-	0.00%
	TOTAL	20,127,594,854	19,285,543,613.56	95.82%

Anggaran Belanja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 dengan yaitu sebesar Rp.20.127.594.854,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.474.063.488,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.13.678.836.617,-

. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebanyak Rp.19.285.543.613,56 (95,82%) dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.195.137.251,57 (82,89) dan Realisasi Belanja Langsung Rp.13.090.406.361,99 (95,70%). Pada tahun 2020 DPMPTSPPTK mempunyai 12 program dan 34 kegiatan.

Sedangkan pada tahun 2021 anggaran Belanja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi sebesar Rp. 22.219.434.304,- yang terdiri dari 11 program 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi Rp. 3.358.159.351,- dengan capaian kinerja keuangan 15,11 % pada triwulan II. Penunjang urusan wajib dan pilihan terdapat 13 (tiga belas) program dan 19 (sembilan belas) dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pelatihan kewirausahaan sebanyak 20 orang dan pelatihan tata boga sebanyak 16 orang, namun melakukan realisasi keuangan.
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
 1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelayanan Antar Kerja
Sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pelayanan pencari kerja dengan capaian kinerja 6 bulan, namun belum melakukan realisasi keuangan.
- 3) Program Hubungan Industrial
 1. Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota
 - a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan 1 (satu) Daerah Kab/Kota.
Merupakan sub kegiatan rutin hubungan industrial capaian kinerja disesuaikan dengan kasus yang diajukan pemohon.
 - b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentunfan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Merupakan sub kegiatan rutin hubungan industrial capaian kinerja disesuaikan dengan kasus yang diajukan pemohon.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Sub. Kegiatan ini telah mencapai target kinerja 3 dokumen, namun belum melakukan realisasi keuangan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Sub kegiatan ini capaian kinerjanya 50% dengan capaian realisasi keuangan 32.58%, untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada DPMPTSPPTK.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 50% dengan realisasi keuangan 28,61% untuk jasa tenaga kebersihan pada DPMPTSPPTK.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Capaian kinerja sesuai kebutuhan.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub dalam proses tender.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Capaian kinerja sebesar 38% dengan realisasi keuangan 29,58% untuk jenis alat tulis yang disediakan.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Capaian kinerja sebesar 25% dengan capaian realisasi keuangan 24,92%.
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
Capaian kinerja sebesar 20% dan capaian realisasi keuangan 18,44% untuk penyediaan jumlah makan dan minum tamu.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 2% dengan capaian realisasi keuangan 1,74%.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 2% dan capaian realisasi keuangan 1.58% untuk perencanaan gedung kantor.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Capaian kinerja dan keuangan sesuai kebutuhan

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian kinerja sub kegiatan ini 35% dengan capaian realisasi keuangan 16,23% untuk rekening listrik, air, internet dan telepon.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Capaian kinerja dan keuangan sesuai kebutuhan.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian kinerja dan keuangan sesuai kebutuhan.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian kinerja dan keuangan sesuai kebutuhan.

d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian kinerja sebesar 50% dan capaian keuangan 30,11% untuk jasa tenaga kebersihan.

5) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota.

Capaian kinerja sebesar 2% dan capaian keuangan 1,78% untuk dokumen potensi penanaman modal yang disusun.

6) Program Promosi Penanaman Modal

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/ Kota

Capaian realisasi keuangan sebesar 1,70%.

7) Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pelayanan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayannya Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Capaian kinerja sebesar 40% dan capaian keuangan 26,26%.
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Sub kegiatan sesuai kebutuhan.
- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
Capaian kinerja sebesar 4% dan capaian realisasi keuangan 3.68% untuk jumlah pengaduan yang ditangani.

8) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sub kegiatan merupakan DAK penanaman modal.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Capaian kinerja sebesar 50% dan capaian keuangan sebesar 55,56%.

9) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/ Kota.
 - a. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
Sub kegiatan sedang dalam pelaksanaan.

10) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota
 - a. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
Capaian kinerja sebesar 2% dan capaian keuangan sebesar 2% serta kegiatan ini dilakukan refocusing.

- b. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.

Sub kegiatan ini dilakukan refocusing.

- c. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri.

Capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 25% dan capaian keuangan 18.78% untuk UPTD dan Dekranasda.

11) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- 1. Kegiatan Penyediaan Informasi industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kab/ kota

- a. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/ kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Sub kegiatan ini dilakukan refocusing.

Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dan Pencapaian s/d Triwulan II Tahun 2021

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	10%		2%	550,049,850					2%		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran pencari kerja yang bersertifikat kewirausahaan	100%		100%	550,049,850					100%		0.00%

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan desain grafis Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan tata boga	80 orang 80 orang 160 orang 160 orang	- 64 orang 64 orang 64 orang	16 orang 16 orang 32 orang 32 orang	550,049,850	- 16 orang	34,741,000.00	17.0 % 6.3%		16 orang 16 orang 32 orang 32 orang	17.0%	6.32%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	300		150	42,923,500					150		

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang memiliki kartu pencari kerja	100%		100%	42,923,500					100%		
	Pelayanan antar Kerja	Jml. Laporan pencari kerja Jml. Penerbitan kartu pencari kerja	5 dokumen 100%	4 dokumen 100%	1 dokumen 100%	42,923,500	0 50%	7,043,950.00	25.0 %	16.4%	1 dokumen 100%	25.0%	16.41%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	0	0	0	77,900,000					0		
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Persentase perusahaan yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%	77,900,000	50%		50.0 %		100%	50.0%	

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota												
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan	35 perusahaan	32 perusaha an	10 perusaha an	38,450,000	5 perusa haan	2,988,000.00	50.0 %	7.8%	10 perusaha an	50.0%	7.77%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada	Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani	100%	100%	100%	39,450,000	50%	-	50.0 %	0.0%	100%	50.0%	0.00%

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											0.0%	0.00%
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan berusaha	100%	100%	100%	154,413,800					100%		
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan dokumen potensi penanaman modal	100%	100%	100%	154,413,800					100%		

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku studi kelayakan investasi Jumlah peta potensi investasi	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen 1 peta	154,413,800	50%	5,417,750.00	50%	3.5%	1 dokumen 1 peta	50.0%	3.51%
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi hijau	80 M		80 M	166,054,850. 00					80 M		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan media dan sarana promosi	75%	75%	75%	166,054,850. 00					75%		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jml. Pameran investasi yang diikuti	5 pameran	4 pameran	1 pameran	166,054,850	0	4,570,900.00	0.0 %	2.8%	1 pameran	0.0%	2.75%

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan secara online	100%	100%	100%	1,134,041,054					100%		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan regulasi pelayanan perizina	100%	100%	100%	1,134,041,054					100%		
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses	3 aplikasi 100% 100%	3 aplikasi 100% 100%	3 aplikasi 100% 100%	1,065,399,854	1 aplikasi	364,825,667.00	15.0 %	34.2%	3 aplikasi 100% 100%	15.0%	34.24%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen aturan hukum perizinan Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan	10 dokumen 60 laporan	8 dokumen 48 laporan	2 dokumen 12 laporan	50,496,650	1 dokumen 6 laporan	5,424,950.00	50.0 %	10.7%	2 dokumen 12 laporan	50.0%	10.74%
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	100%	100%	100%	18,144,550	25%	4,905,577.00	25.0 %	27.0%	100%	25.0%	27.04%
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan	75%	70%	75%	377,061,800					75%	0.0%	

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	75%	70%	75%	377,061,800					75%	0.0%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	326,122,000	50.0%	14,853,332.00	50.0 %	4.6%	1 dokumen	50.0%	4.55%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	50,939,800	50.0%	32,723,450.00	50.0 %	64.2%	1 dokumen	50.0%	64.24%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data informasi perizinan secara online	90 persen	95 persen	90 persen	84,006,800					90 persen		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan perizinan online tepat waktu	82 persen	78 persen	82 persen	84,006,800					82 persen		
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	15000 berkas 240 laporan 100 persen	3000 berkas 192 laporan 100 persen	1000 berkas 48 laporan 100 persen	84,006,800	200 berkas 12 laporan 25 persen	8,925,000.00	50.0 % 10.6%		1000 berkas 48 laporan 100 persen	50.0%	10.62%

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	A	A	18,246,492,1 30			25. 0%		A	25.0%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan program dan kegiatan pada Renja dengan Renstra Perangkat Daerah	85 persen	80 persen	85 persen	21,540,000					85 persen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	15 jenis	12 jenis	3 jenis	21,540,000	1 jenis	-	30.0 %	0.0%	3 jenis	30.0%	0.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	95 persen	90 persen	95 persen	7,176,761,89 0					95 persen		

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji	57 orang	57 orang	57 orang	7,176,761,890	50%	3,005,964,524.00	50.0 %	41.9%	57 orang	50.0%	41.88%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	95 persen	90 persen	95 persen	356,128,000					95 persen		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor	14 orang 60 bulan	48 orang 60 bulan	14 orang 12 bulan	356,128,000	14 orang 4 bulan	125,519,860.00	50.0 %	35.2%	14 orang 12 bulan	50.0%	35.25%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	95 persen	95 persen	95 persen	2,269,615,100					95 persen	0.0%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang dibeli	225 jenis	213 jenis	12 jenis	6,134,000	0	-	0.0 %	0.0%	12 jenis	0.0%	0.00%

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	50 jenis	40 jenis	38 jenis	1,921,648,000	0	-	0.0 %	0.0%	38 jenis	0.0%	0.00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis yang dibeli	230 jenis	200 jenis	38 jenis	23,443,100	19 jenis	6,935,500.00	40.0 %	29.6%	38 jenis	40.0%	29.58%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan	42 jenis 150250 lembar 450 buah	42 jenis 12090 lembar 412 buah	6 jenis 30032 lembar 125 buah	20,230,000	2 jenis 500 lembar 25 buah	6,402,400.00	25.0 %	31.6%	6 jenis 30032 lembar 125 buah	25.0%	31.65%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jml. penyediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur Jml. Makan minum tamu difasilitasi	60 bulan 500 porsi	48 bulan 500 porsi	60 bulan 100 porsi	8,620,000	12 bulan 20 porsi	2,816,000.00	18.0 %	32.7%	60 bulan 100 porsi	18.0%	32.67%

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	90 persen	90 persen	90 persen	289,540,000	20 persen	14,930,900.0 0	2.0 %	5.2%	90 persen	2.0%	5.16%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	95 persen	95 persen	95 persen	6,082,380,00 0					95 persen		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembangunan gedung kantor	60 bulan 1 unit	48 bulan 1 unit	12 bulan 1 unit	6,082,380,000	3 bulan 1 unit	95,985,200.0 0	2.0 %	1.6%	12 bulan 1 unit	2.0%	1.58%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	95 persen	95 persen	95 persen	1,733,660,00 0					95 persen		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek	60 bulan 20 buah 1150 buah	48 bulan 16 buah 1025 buah	12 bulan 4 buah 125 buah	3,660,000	0		0.0 %	0.0%	12 bulan 4 buah 125 buah	0.0%	0.00%

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
		Jumlah materai 10000											
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telepon yang dibayar	60 bulan 60 bulan 60 bulan 60 bulan	48 bulan 48 bulan 48 bulan 48 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1,730,000,000	3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan	344,407,321. 00	17.0 %	19.9%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	17.0%	19.91%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase laporan umum dan	95 persen	95 persen	95 persen	606,407,140					95 persen		

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Pemerintahan Daerah	kepegawaian tepat waktu											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan esselon 2 yang diperlihara	1 unit	1 unit	1 unit	41,210,000	0	2,425,750.00	7.0 %	5.9%	1 unit	7.0%	5.89%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	14 unit 8 unit	14 unit 8 unit	14 unit 8 unit	158,931,400	0	19,299,706.0 0	15.0 %	12.1%	14 unit 8 unit	15.0%	12.14%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor	60 bulan	48 bulan	12 bulan	5,660,000	0	230,000.00	16.0 %	4.1%	12 bulan	16.0%	4.06%

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jml. Jasa cleaning service	50 jenis 60 bulan	40 jenis 48 bulan	10 jenis 12 bulan	400,605,740	10 jenis 3 bulan	147,600,783.00	30.0 %	36.8%	10 jenis 12 bulan	30.0%	36.84%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	10%	10%	10%	1,309,882,120					10%		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM mendapatkan pembinaan manajemen	350 IKM	350 IKM	350 IKM	1,309,882,120					350 IKM		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan	Jumlah IKM yang mengikuti	15 IKM 75 IKM	15 IKM 75 IKM	3 IKM 15 IKM	307,073,354	0	17,510,011.00	2.0 %	5.7%	3 IKM 15 IKM	2.0%	5.70%

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Pembangunan Sumber Daya Industri	Konvensi GKM Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi GKM Jumlah peserta bimbingan teknis standarisasi produk Jumlah peserta pelatihan packing Jumlah sertifikasi label halal IKM	125 orang 150 orang 50 IKM	125 orang 150 orang 50 IKM	25 orang 30 orang 10 IKM						25 orang 30 orang 10 IKM		

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah alat kerajinan industri yang dipelihara Jumlah gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industri yang difasilitasi	1 unit 1 unit 1 organisasi	1 unit 1 unit 1 organisasi	1 unit 1 unit 1 organisasi	412,393,766	0	77,443,072.0 0	4.0 %	18.8%	1 unit 1 unit 1 organisasi	4.0%	18.78%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pameran Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) yang diikuti Jumlah peserta magang sepatu sandal Jumlah peserta	20 event 25 orang 250 orang	16 event 25 orang 250 orang	4 event 5 orang 10 orang	590,415,000	0		0.0 %	0.0%	4 event 5 orang 10 orang	0.0%	0.00%

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
		pelatihan kain perca											
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	50%	50%	50%	74,250,800					50%		
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan data dan informasi industri	100%	100%	100%	74,250,800					100%		
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan	Jumlah dokumen data	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	74,250,800	0		0.0 %	0.0%	1 dokumen	0.0%	0.00%

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	informasi industri											
	BELANJA OPERASI												
	Belanja Pegawai												
	Belanja Barang dan Jasa												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	A	A	2,357,600					A		

KODE REKEN ING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%	2,357,600					100%		
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jml. Jasa cleaning service	32 jenis 12 bulan	32 jenis 12 bulan	32 jenis 12 bulan	2,357,600	0	1,456,000.00	0.0 %	61.8%	32 jenis 12 bulan	0.0%	61.76%

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja harus merujuk pada sasaran dan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan industri di tingkat nasional. DPMPSTPPTK memiliki 3 kewenangan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal, urusan wajib bidang tenaga kerja dan urusan pilihan bidang industri.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. PTSP di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni Terwujudnya Indonesia sebagai Negara tujuan Investasi yang Menarik”. Agar tercapainya visi tersebut, BKPM memiliki sejumlah misi yang merupakan bentuk teknis dari visi. Misi-misi tersebut sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif.
Misi ini mencakup penyediaan rumusan peraturan, undang-undang dan kebijakan penanaman modal.
2. Meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal.
Misi ini mencakup peningkatan minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri serta mendukung terciptanya kesepakatan kerjasama penanaman modal yang sesuai dengan kepentingan nasional.
3. Meningkatkan fasilitas, pelayanan dan advokasi terkait pelaksanaan penanaman modal.
Mencakup peningkatan kualitas pelayanan serta adanya pengendalian dalam pelaksanaan modal agar realisasi investasi meningkat.
4. Meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi penanaman modal.

Mencakup peningkatan kualitas pelayanan perencanaan program serta mewujudkan keserasian dalam hubungan masyarakat terkait penanaman modal.

Sedangkan untuk kewenangan urusan pilihan bidang industri, mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Perindustrian. Visi Kemenperin yaitu Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh, yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk arah dan kebijakan nasional yang terkait dengan ketenagakerjaan yakni sesuai dengan kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda dan arah kebijakan pembangunan nasional, yang dirumuskan dengan Nawa Kerja Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional
2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
3. Percepatan sertifikasi profesi
4. Perluasan kesempatan kerja formal
5. Penguatan wirausaha produktif
6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif
7. Penegakkan hukum ketenagakerjaan
8. Peningkatan perlindungan pekerja migran

9. Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Adapun misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah

1. Misi 2 yaitu Meningkatkan kinerja pemerintahan secara lebih professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan
2. Misi 4 yaitu Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih Berdaya Guna.

Dengan tujuan tingkat Kota yang akan dicapai:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi perkotaan yang berkualitas.

Adapun sasaran tingkat kota yaitu:

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Peningkatan pembangunan ekonomi sektor sekunder
4. Peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier.

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun kedepan dengan berpedoman kepada Visi dan Misi yang didasarkan pada analisis strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat
2. Meningkatnya nilai investasi.

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
2. Meningkatnya peluang investasi
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan
4. Meningkatnya kesempatan kerja.

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang terdapat pada Perubahan Renja sebagai berikut :

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 2. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
 2. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelayanan Antar Kerja
- 3) Program Hubungan Industrial
 2. Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota
 - c. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan 1 (satu) Daerah Kab/Kota
 - d. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentunfan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 8. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 9. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

10. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - k. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangf Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - g. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - h. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
 - b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota
- 6) Program Promosi Penanaman Modal
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/ Kota
- 7) Program Pelayanan Penanaman Modal
 2. Kegiatan Pelayanan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota
 - d. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- e. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - f. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
- 8) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 2. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 9) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 2. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/ Kota.
 - b. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- 10) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - 2. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota
 - d. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
 - e. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
 - f. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri.
- 11) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - 2. Kegiatan Penyediaan Informasi industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kab/ kota
 - b. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/ kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja serta membantu Walikota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Beberapa program dan kegiatan pada Tahun 2021 yang mengalami perubahan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMPTSPPTK Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	APBD	APBDP	Jumlah Perubahan
	PENDAPATAN DAERAH	580,408,600	580,408,600	0
	Retribusi Daerah	580,408,600	580,408,600	0
	Retribusi Jasa Usaha	80,408,600	80,408,600	0
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80,408,600	80,408,600	0
	Retribusi Pemakaian Alat	80,408,600	80,408,600	0
	Retribusi Perizinan Tertentu	500,000,000	500,000,000	0
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500,000,000	500,000,000	0
	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	500,000,000	500,000,000	0
	BELANJA DAERAH	22,219,434,304	22,219,434,304	22,219,434,304
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	550,049,850	590,249,850	40,200,000
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	550,049,850	590,249,850	40,200,000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	550,049,850	590,249,850	40,200,000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	42,923,500	42,923,500	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	APBD	APBDP	Jumlah Perubahan
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	42,923,500	42,923,500	0
	Pelayanan antar Kerja	42,923,500	42,923,500	0
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	77,900,000	77,900,000	0
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	77,900,000	77,900,000	0
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38,450,000	38,450,000	0
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39,450,000	39,450,000	0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,246,492,130	17,841,354,355	-405,137,775
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,540,000	21,540,000	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,540,000	21,540,000	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,176,761,890	7,147,165,455	-29,596,435
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,176,761,890	7,147,165,455	-29,596,435
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	356,128,000	327,480,000	-28,648,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	356,128,000	327,480,000	-28,648,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,269,615,100	2,284,615,100	15,000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,134,000	6,134,000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,921,648,000	1,921,648,000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,443,100	23,443,100	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,230,000	20,230,000	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	APBD	APBDP	Jumlah Perubahan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,620,000	23,620,000	15,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289,540,000	289,540,000	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,082,380,000	6,082,380,000	0
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,082,380,000	6,082,380,000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,733,660,000	1,383,660,000	-350,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,660,000	3,660,000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,730,000,000	1,380,000,000	-350,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606,407,140	594,513,800	-11,893,340
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41,210,000	41,210,000	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158,931,400	178,931,400	20,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,660,000	5,660,000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400,605,740	368,712,400	-31,893,340
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	154,413,000	133,983,800	-20,429,200
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	154,413,000	133,983,800	-20,429,200
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	154,413,000	133,983,800	-20,429,200
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	166,054,850	166,054,850	0
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	166,054,850	166,054,850	0
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	166,054,850	166,054,850	0
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1,134,041,254	1,124,327,318	-9,713,936

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	APBD	APBDP	Jumlah Perubahan
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1,134,041,254	1,124,327,318	-9,713,936
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1,065,399,854	1,055,685,918	-9,713,936
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	50,496,650	50,496,650	0
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	18,144,750	18,144,750	0
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	377,061,000	384,856,800	7,795,800
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	377,061,000	384,856,800	7,795,800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	326,122,000	326,122,000	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	50,939,000	58,734,800	7,795,800
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	84,006,800	84,006,800	0
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84,006,800	84,006,800	0
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	84,006,800	84,006,800	0
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	897,488,354	184,889,354	-712,599,000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	897,488,354	184,889,354	-712,599,000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	307,073,354	155,689,354	-151,384,000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	APBD	APBDP	Jumlah Perubahan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	590,415,000	29,200,000	-561,215,000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	74,250,800	0	-74,250,800
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	74,250,800	0	-74,250,800
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	74,250,800	0	-74,250,800
TOTAL		21,804,681,538	20,630,546,627	-1,174,134,911
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,358,700	2,358,700	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,358,700	2,358,700	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,358,700	2,358,700	0
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	412,623,768	468,575,766	55,951,998
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	412,623,768	468,575,766	55,951,998
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	412,623,768	468,575,766	55,951,998
TOTAL		414,982,468	470,934,466	55,951,998

Pada umumnya sub kegiatan yang dilakukan perubahan pada tahun 2021 adalah :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp.7.176.761.890,- dilakukan pengurangan sebesar Rp.29.596.435,- sehingga menjadi Rp.7.147.165.455,- untuk refocusing penanganan Covid 19.
2. Pengamanan barang milik daerah SKPD dianggarkan sebesar Rp.356.128.000,- dikurangi sebesar Rp.28.648.000,- menjadi Rp.327.480.000,- yang merupakan sisa kontrak jasa kebersihan kantor.

3. Fasilitas kunjungan tamu dianggarkan sebesar Rp.8.620.000 dilakukan perubahan anggaran sebesar Rp.15.000.000,0 sehingga menjadi Rp.23.620.000,-. Penambahan anggaran ini untuk makan dan minum tamu serta cendera mata tamu.
4. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dianggarkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.730.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 1.380.000.000,-, ada pengurangan sebesar Rp.350.000.000,- yang merupakan sisa belanja internet.
5. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dianggarkan sebesar Rp.158.931.400,- ditambah sebesar Rp.20.000.000,- sehingga menjadi Rp.178.931.400,- untuk pemeliharaan kendaraan operasional.
6. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dianggarkan Rp.400.605.740,- dikurangi sebesar Rp.31.893.340,- sehingga menjadi Rp.368.712.400,- , yang merupakan sisa kontrak pekerjaan jasa kebersihan.
7. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota dianggarkan Rp.154.413.000,- dikurangi sebesar Rp.20.429.200,- sehingga menjadi Rp.133.983.800,- , yang merupakan sisa pelaksanaan kegiatan.
8. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dianggarkan sebesar Rp.1.065.399.854,- pada perubahan Tahun 2021 ada perubahan untuk penganggaran insentif IMB dan sisa pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.9.713.936,- sehingga menjadi Rp.1.055.685.918,-.
9. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal telah dianggarkan sebesar Rp.50.939.000,- dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.7.795.800,- sehingga menjadi Rp.59.734.800,- untuk penambahan belanja barang dan jasa kegiatan.
10. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp.151.384.000,- sehingga anggaran awal Rp.307.073.354,- menjadi Rp.155.689.354,-.
11. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp.561.215.000,- sehingga anggaran awal Rp.590.415.000,- menjadi Rp.29.200.000,-.
12. Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas) dilakukan refocusing keseluruhan Rp.74.250.000,-.

13. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri dianggarkan sebesar Rp.412.623.768,- dilakukan penambahan sebesar Rp.55.951.998,- untuk peralatan dan perlengkapan dekranasta, sehingga anggaran menjadi Rp.468.575.766,-.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Rencana Prgram dan Kegiatan Dalam Perubahan RKPD
Kota Bukittinggi Tahun 2021

[illegible]

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA	Tingkat Penganggu ran Terbuka	Tingkat Penganggu ran Terbuka			4,93 persen	4,93 persen	550,049,850	590,249,850	40,200,000			
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifika t keahlian	Persentase tenaga kerja bersertifika t keahlian			63 persen	63 persen	550,049,850	590,249,850	40,200,000			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan desain grafis Jumlah peserta pelatihan kewirausah aan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan tata boga	Jumlah peserta pelatihan desain grafis Jumlah peserta pelatihan kewirausah aan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan tata boga	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 orang 16 orang 32 orang 32 orang	16 orang 16 orang 32 orang 32 orang	550,049,850	590,249,850	40,200,000	DAU	DAU	Pokir DPRD Nur Asra; M. Angga Alfarici; H. Irman; Abdul Rahman; Ibnu Azis (Penamba han Pokir)
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Penganggu ran Terbuka	Tingkat Penganggu ran Terbuka			4,93 persen	4,93 persen	42,923,500	42,923,500	0			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja bersertifikat keahlian	Persentase tenaga kerja bersertifikat keahlian			63 persen	63 persen	42,923,500	42,923,500	0			
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah laporan pencari kerja	Jumlah laporan pencari kerja	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	12 laporan	42,923,500	42,923,500	0	DAU	DAU	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka			4,93 persen	4,93 persen	77,900,000	77,900,000	0			
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat persentase penurunan kasus hubungan industrial	Tingkat persentase penurunan kasus hubungan industrial			21 persen	21 persen	77,900,000	77,900,000	0			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanak an	Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanak an	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 perusahaan	10 perusahaan	38,450,000	38,450,000	0	DAU	DAU	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani	Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	39,450,000	39,450,000	0	DAU	DAU	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Nilai SAKIP SKPD			A .	A .	18,246,492,130	17,871,704,355	- 374,787,775			
	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasa n program dan kegiatan pada Renja dengan Renstra Perangkat Daerah	Persentase keselarasa n program dan kegiatan pada Renja dengan Renstra Perangkat Daerah			85 persen	85 persen	21,540,000	21,540,000	0			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaa n yang disusun	Jumlah dokumen perencanaa n yang disusun	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	3 jenis	3 jenis	21,540,000	21,540,000	0	DAU	DAU	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu			95 persen	95 persen	7,176,761,890	7,147,165,455	-29,596,435			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji	Jumlah ASN yang digaji	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 orang	57 orang	7,176,761,890	7,147,165,455	-29,596,435	DAU	DAU	Refocusing
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu			95 persen	95 persen	356,128,000	327,480,000	-28,648,000			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa pengamana n kantor Jumlah pelaksanaa n pengamana n kantor	Jumlah jasa pengamana n kantor Jumlah pelaksanaa n pengamana n kantor	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	2 orang 12 bulan	2 orang 12 bulan	356,128,000	327,480,000	-28,648,000	DAU	DAU	Sisa Tender
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaia n tepat waktu	Persentase laporan umum dan kepegawaia n tepat waktu			95 persen	95 persen	2,269,615,100	2,314,965,100	45,350,000			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang dibeli	Jenis peralatan listrik yang dibeli	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	45 jenis	45 jenis	6,134,000	6,134,000	0	DAU	DAU	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	10 jenis	10 jenis	1,921,648,000	1,951,998,000	30,350,000	DAU	DAU	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis yang dibeli	Jenis alat tulis yang dibeli	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	46 jenis	46 jenis	23,443,100	23,443,100	0	DAU	DAU	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandaka n Jumlah dokumen yang dijilid	Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandaka n Jumlah dokumen yang dijilid	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	7 jenis 30050 lembar 90 buah	7 jenis 30050 lembar 90 buah	20,230,000	20,230,000	0	DAU	DAU	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jml. penyediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur Jumlah makan minum tamu difasilitasi	Jml. penyediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur Jumlah makan minum tamu difasilitasi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 bulan 200 porsi	12 bulan 200 porsi	8,620,000	23,620,000	15,000,000	DAU	DAU	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	90 persen	90 persen	289,540,000	289,540,000	0	DAU	DAU	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu			95 persen	95 persen	6,082,380,000	6,082,380,000	0			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pembangunan gedung kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pembangunan gedung kantor	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 bulan 1 unit	12 bulan 1 unit	6,082,380,000	6,082,380,000	0	DAU	DAU	Belanja Prioritas Kota

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaia n tepat waktu	Persentase laporan umum dan kepegawaia n tepat waktu			95 persen	95 persen	1,733,660,00 0	1,383,660,000	- 350,000,000			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai 3000 Jumlah materai 6000	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai 3000 Jumlah materai 6000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 bulan 4 buah 175 buah 230 buah	12 bulan 4 buah 175 buah 230 buah	3,660,000	3,660,000	0	DAU	DAU	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telepon yang dibayar	Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telepon yang dibayar	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1,730,000,000	1,380,000,000	-350,000,000	DAU	DAU	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaia n tepat waktu	Persentase laporan umum dan kepegawaia n tepat waktu			95 persen	95 persen	606,407,140	594,513,800	-11,893,340			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan esselon 2 yang diperlihara	Jumlah kendaraan esselon 2 yang diperlihara	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	1 unit	1 unit	41,210,000	41,210,000	0	DAU	DAU	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	14 unit 8 unit	14 unit 8 unit	158,931,400	178,931,400	20,000,000	DAU	DAU	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor	Jasa perbaikan peralatan kantor	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 bulan	12 bulan	5,660,000	5,660,000	0	DAU	DAU	
	Pemeliharaan/ Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jml. jasa cleaning service	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jml. jasa cleaning service	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 jenis 12 bulan	12 jenis 12 bulan	400,605,740	368,712,400	-31,893,340	DAU	DAU	Sisa Tender
	PROGRAM PENGEMBAN GAN IKLIM PENANAMAN MODAL	ICOR (Increment al Capital Output Ratio)	ICOR (Increment al Capital Output Ratio)			3.5 rasio	3.5 rasio	154,413,800	133,983,800	-20,430,000			
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/K ota	Persentase peningkata n jumlah potensi investasi	Persentase peningkata n jumlah potensi investasi			45 persen	45 persen	154,413,800	133,983,800	-20,430,000			
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Ko ta	Jumlah buku studi kelayakan investasi Jumlah peta potensi investasi	Jumlah buku studi kelayakan investasi Jumlah peta potensi investasi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	1 dokumen 1 peta	1 dokumen 1 peta	154,413,800	133,983,800	-20,430,000	DAU	DAU	
	PROGRAM PROMOSI	Persentase peningkata n realisasi	Persentase peningkata n realisasi			10 persen	10 persen	166,054,850	166,054,850	0			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PENANAMAN MODAL	investasi (%)	investasi (%)										
	Penyelenggara an Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi			2.3 Triliyun	2.3 Triliyun	166,054,850	166,054,850	0			
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah promosi investasi yang diikuti	Jumlah promosi investasi yang diikuti	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 event	1 event	166,054,850	166,054,850	0	DAU	DAU	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	"Indeks kepuasan masyaraka t masyaraka t terhadap pelayanan perizinan"	"Indeks kepuasan masyaraka t masyaraka t terhadap pelayanan perizinan"			90 .	90 .	1,134,041,054	1,124,327,118	-9,713,936			
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik			82 persen	82 persen	1,134,041,054	1,124,327,118	-9,713,936			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota												
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 aplikasi 3700 izin 100 persen	3 aplikasi 3700 izin 100 persen	1,065,399,854	1,055,685,918	-9,713,936	DAU	DAU	Belanja Operaiso nal Pelayana n
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen aturan hukum perizinan Jumlah laporan koordinasi dan pengawasa n perizinan	Jumlah dokumen aturan hukum perizinan Jumlah laporan koordinasi dan pengawasa n perizinan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen 1 laporan	2 dokumen 1 laporan	50,496,650	50,496,650	0	DAU	DAU	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	18,144,550	18,144,550	0	DAU	DAU	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)			3.5 rasio	3.5 rasio	377,061,800	384,856,800	7,795,000			
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keuntungan investasi	Tingkat keuntungan investasi			25 persen	25 persen	377,061,800	384,856,800	7,795,000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	326,122,000	326,122,000	0	DAU	DAU	Pergeseran Belanja DAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	50,939,800	58,734,800	7,795,000	DAU	DAU	Penambahan upah tenaga pendamping LKPM
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan			90 persen	90 persen	84,006,800	84,006,800	0			
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik			82 persen	82 persen	84,006,800	84,006,800	0			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	3000 berkas 48 laporan 100 persen	3000 berkas 48 laporan 100 persen	84,006,800	84,006,800	0	DAU	DAU	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tingkat Penganggu ran Terbuka	Tingkat Penganggu ran Terbuka			4,93 %	4,93 %	897,488,354	184,889,354	- 712,599,000			
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuh an unit usaha IKM	Persentase pertumbuh an unit usaha IKM			13 persen	13 persen	897,488,354	184,889,354	- 712,599,000			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Konvensi GKM Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi GKM Jumlah peserta bimbingan teknis standarisas i produk Jumlah peserta pelatihan packing Jumlah sertifikasi label halal IKM	Jumlah IKM yang mengikuti Konvensi GKM Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi GKM Jumlah peserta bimbingan teknis standarisas i produk Jumlah peserta pelatihan packing Jumlah sertifikasi label halal IKM	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 IKM 25 IKM 25 orang 30 orang 10 IKM	5 IKM 25 IKM 25 orang 30 orang 10 IKM	307,073,354	155,689,354	-151,384,000	DAU	DAU	Refocusin g dan sis a pengguna an anggaran
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pameran Kompetens i Inti Industri Daerah (KIID) yang diikuti Jumlah peserta magang	Jumlah pameran Kompetens i Inti Industri Daerah (KIID) yang diikuti Jumlah peserta magang	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 event 5 orang 50 orang	4 event 5 orang 50 orang	590,415,000	29,200,000	-561,215,000	DAU	DAU	Refocusin g dan sis a pengguna an anggaran

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		sepatu sandal Jumlah peserta pelatihan kain perca	sepatu sandal Jumlah peserta pelatihan kain perca										
	PROGRAM PENGELOLAA N SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Penganggu ran Terbuka	Tingkat Penganggu ran Terbuka			4,93 %	4,93 %	74,250,800	0	-74,250,800			
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/K ota	Persentase pertumbuh an industri yang memiliki legalitas usaha	Persentase pertumbuh an industri yang memiliki legalitas usaha			13 persen	13 persen	74,250,800	0	-74,250,800			
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta	Jumlah dokumen data informasi industri	Jumlah dokumen data informasi industri	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	74,250,800	0	-74,250,800	DAU	DAU	Refocusin g

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Data Lain Lingkup Kabupaten/Ko ta melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)												
TOTAL								21,804,682,9 38	20,660,896,427	- 1,143,786,5 11			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Nilai SAKIP SKPD			A .	A .	2,357,600	2,357,600	0			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan umum kepegawaia n tepat waktu	Persentase laporan umum kepegawaia n tepat waktu			95 persen	95 persen	2,357,600	2,357,600	0			
	Pemeliharaan/ Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang dibeli	Jenis alat kebersihan yang dibeli	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	8 jenis	8 jenis	2,357,600	2,357,600	0	DAU	DAU	UPTD Kerajinan Industri

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (N)									Catatan Penting
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan	Sebel um Perub ahan	Sesud ah Perub ahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tingkat Penganggu ran Terbuka	Tingkat Penganggu ran Terbuka			4,93 %	4,93 %	412,393,766	468,575,766	56,182,000			
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM			13 persen	13 persen	412,393,766	468,575,766	56,182,000			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah alat kerajinan industri yang dipelihara Jumlah gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industri yang difasilitasi	Jumlah alat kerajinan industri yang dipelihara Jumlah gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industri yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	1 unit 1 unit 1 organisasi	1 unit 1 unit 1 organisasi	412,393,766	468,575,766	56,182,000	DAU	DAU	Pembelian infocus, CCTV, Neon Box, Papam Merk dan Kursi Tamu (Dekransda)
TOTAL								414,751,366	470,933,366	56,182,000			

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021 menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja, yang memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan sesuai dengan visi dan misi DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi sampai akhir periode Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini memuat program dan kegiatan prioritas DPMPTSPPTK yang juga menjadi pedoman penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021, sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja perubahan ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Terima kasih.

Bukittinggi, 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR